

Caste Politics: Klientelisme dalam Pemerintahan Ram Nath Kovind terhadap Kasta Dalit di India

Ni Luh Ayu Meliana¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Gede Indra Pramana³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ayuumeliana@gmail.com¹, ketut.erawan@ipd.or.id², indraprama@unud.ac.id³

ABSTRACT

This research will explain the political discrimination against the Dalit caste as the lowest caste in India. Caste hierarchy and its role in politics and access to power and resources have created a society that has patron-client relationships along caste lines. The method used in this research is qualitative with a more specific domain in India during the reign of Ram Nath Kovind (2017-2022). Research utilizes the theory of clientelism and subaltern to explain that it is part of 'politics of survival' in an insecure political environment. Studies related to clientelism are important considering that historical and structural perspectives regarding caste exploitation in India have influenced the phenomenon of relations and patterns of power in politics in developing countries. The findings in this research found that conflicts of interest triggered the waning of Ram Nath Kovind's loyalty to the Dalit caste. It is clear that political clientelism towards the Dalit caste only benefits patrons without a win-win solution.

Keywords: Dalit caste, Ram Nath Kovind, India, clientelism

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berupaya memahami diskriminasi politik terhadap kasta Dalit dalam sistem politik di India yang sangat bergantung pada garis kasta. Akibat label Dalit sebagai kasta terpinggirkan (*untouchables*) di India, masyarakat yang lahir dari kasta ini kesulitan memanjat tangga sosial. Kehidupan mereka melarat dan menjadi sasaran diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik. Status serta peran sosial merupakan hal yang saling beriringan, dimana kasta secara historis akan melekat pada individu dan menjadi peran turun-temurun.

Kasta dalam kehidupan bermasyarakat di India mengacu pada kelompok sosial yang keanggotaannya sudah ditentukan dan dibawa sejak lahir. Praktik stratifikasi sosial ini masih berlangsung hingga kini, terutama dalam

aspek kehidupan sosial politik. Tradisi kasta seakan menjadi tameng bagi kasta atas dalam mempertahankan hak istimewanya, di mana faktor keturunan menentukan kelas sosial seseorang di India.

Sistem kasta di India ditemukan dalam salah satu kitab suci agama Hindu yaitu Manu Smriti. Dalam kitab tersebut mendeskripsikan sistem Varna yang mengacu pada pengelompokan masyarakat berdasarkan pekerjaannya. Terdapat empat tingkatan Varna yang terdiri atas empat jenis masyarakat yang tercipta dari tubuh Dewa Wisnu. Menurut mitologi ini, tingkatan paling atas Brahmana lahir dari kepala dan memiliki pekerjaan sebagai pendeta. Pada tingkatan dibawahnya, Ksatria lahir diluar lengan dengan pekerjaan sebagai prajurit. Tingkatan berikutnya, Waisya lahir dari perut yang bekerja sebagai pedagang

dan pemilik tanah. Kasta terendah, Sudra lahir dari kaki dan bekerja menjadi pelayan (Rajshekara, 2003).

Hal ini menekankan bahwa Sudra sebagai budak, karena mereka lahir dari kaki sehingga ditakdirkan untuk melayani masyarakat pada tingkatan kasta atas, dalam hal ini Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Dalit berada di luar batas-batas kasta di India yang bahkan tidak terdaftar dalam tingkatan sistem Varna, sehingga kerap kali dipandang sebagai individu buangan. Kelompok masyarakat Dalit melangsungkan hidupnya dengan pekerjaan yang sebagian besar dihindari oleh orang lain, seperti memulung bangkai binatang, pengemis, pembersih saluran air, pemulung kotoran manusia, dan pekerjaan kurang layak lainnya dengan upah rendah.

Diskriminasi terhadap Dalit masih parah, terutama di pedesaan. Himpunan suatu kasta biasanya hidup dalam lingkungan kasta yang sama. Strategi kawasan tinggal yang melanggengkan kelompok kelas sosial ini secara alami meningkatkan potensi konflik. Buruknya akses terhadap ekonomi kerakyatan serta pendidikan membuat masyarakat India yang lahir dari keluarga kasta rendah tidak mampu melakukan mobilisasi sosial karena kemampuan akses dan kontrol politik juga kurang baik. Sistem kasta adalah masalah khusus dalam sistem demokrasi India.

Pemerintah India juga tidak memberikan informasi yang memadai tentang situasi kaum Dalit. Instansi pemerintah di India dan Parlemen India sendiri telah gagal membuat laporan yang tersedia untuk umum. Laporan yang tersedia dalam *National Commission for Scheduled Castes* hanya terbatas pada kasta tingkat atas, sementara Dalit lebih

representatif untuk menunjuk kelompok masyarakat di India yang tertindas dibandingkan dengan kasta yang terdaftar. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali mendesak Pemerintah India untuk melakukan survei berkala tentang realitas diskriminasi berbasis kasta dan menyediakan data kualitatif serta kuantitatif yang dipilah berdasarkan kasta dan gender dalam laporannya kepada komite, namun sejauh ini tidak berhasil. Kegagalan pihak Pemerintahan India untuk mengumpulkan dan mencatat informasi tentang hak asasi manusia oleh Dalit itu sendiri menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu diskriminasi kasta.

Terpilihnya presiden baru dari kasta Dalit pada tahun 2017 lalu tentunya seolah memberi secercah harapan baru bagi kaum *untouchables*. Kemenangan Ram Nath Kovind menarik untuk dikaji terutama karena politik di India juga sangat bergantung pada sistem kasta, dimana kasta yang dimiliki individu berfungsi sebagai penentu kuat dari pola pemungutan suara mereka. Individu dari kasta atas memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan politiknya. Hierarki kasta dan perannya dalam politik serta akses ke kekuasaan dan sumber daya telah menciptakan masyarakat yang memiliki hubungan patron-klien di sepanjang garis kasta. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tercetus penelitian yang berjudul "*Caste Politics: Klientelisme dalam Pemerintahan Ram Nath Kovind terhadap Kasta Dalit di India*".

2. KAJIAN PUSTAKA

Arild Engelsen Ruud (2011) dalam jurnalnya yang berjudul *Dalit Politics in India* yang menegaskan hampir tidak adanya hak politik bagi kasta Dalit. Tindakan diskriminasi yang diterima kaum Dalit tersebut diantaranya posisi pemerintah, kursi di negara bagian (provinsi), dan majelis nasional. Hal ini menunjukkan revolusi demokrasi India belum selesai. Dilema penting di India adalah partai politik India terkesan menyepelkan basis massa kasta Dalit. Hak politik kasta Dalit yang terbatas hanya membentuk kurang dari 25 persen populasi sehingga dianggap tidak akan memenangkan kekuasaan atau dapat mengubah negara. Pandangan kasta terdapat di India yang masih menganggap kasta Dalit sebagai kasta tidak tersentuh memperlihatkan bahwa hak politik bagi kasta ini masih sangat terbatas.

Dalit yang secara historis dianggap sebagai kasta 'tidak tersentuh' yang kerap kali mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis kasta juga diungkapkan dalam jurnal berjudul *Digital Archiving as Social Protest: Dalit Camera and the mobilization of India's "Untouchables"*. Subin, dkk. (2018) menyatakan bahwa beberapa negara bagian India seperti Uttar Pradesh, Kasta Dalit memiliki kekuatan politik yang semakin terorganisir selama beberapa dekade terakhir. Akan tetapi, sebagai suatu kesatuan populasi, Dalit sebagian besar miskin, sangat terdiskriminasi, sangat tradisional, dan lebih dari setengah masyarakatnya buta huruf. Terlepas dari implementasi cita-cita demokrasi seperti kesetaraan, Dalit tetap berada di bagian bawah stratifikasi sosial di India.

Keberadaan gerakan Dalit untuk memperjuangkan kesetaraan pun masih dibatasi. Meskipun konstitusi India secara resmi menghapus ketidakterbatasan Dalit, dalam praktiknya ketidakterbatasan tersebut masih ada, terutama di daerah pedesaan.

Anne Waldrop (2011) menyumbangkan pemikirannya terhadap politik kasta dengan memaparkan bahwa sistem kasta tidak dapat dipahami dalam bentuk tunggal, tetapi merupakan bagian dari struktur sosial. Kasta Dalit berada di dasar sistem struktural ketidaksetaraan, maka dari itu kasta ini kerap kali menerima perlakuan buruk seperti dieksploitasi dan didiskriminasi. Dalam jurnalnya yang berjudul *Dalit Politics in India and New Meaning of Caste*, menjelaskan pilar-pilar material dan historis yang menyebabkan sulitnya untuk menghilangkan diskriminasi dan eksploitasi kasta. Kesimpulan dalam jurnal ini menyatakan walaupun terdapat kebangkitan mobilisasi politik kasta Dalit di India, hal tersebut tidak mampu menghentikan terjadinya tindakan eksploitasi dan diskriminasi. Berbagai perdebatan terkait keberadaan kasta Dalit terus diperbincangkan dari masa lalu hingga masa kini, namun tetap saja tidak ada perubahan berarti.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan untuk menyusun penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014), menyangkut penggunaan kerangka kerja interpretatif, bertujuan untuk mengimplementasikan studi terkait suatu permasalahan yang memaknai manusia sebagai objek kajian utama. Dalam hal ini, penelitian kualitatif dimulai dengan

asumsi dan penggunaan kerangka teoritis yang menginformasikan studi tentang makna individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial atau manusia (Creswell & Poth, 2016). Penelitian kualitatif berkaitan dengan data yang non numerik dan mengumpulkan serta menganalisis data naratif.

Menurut Jane Ritchie & Jane Lewis (2013), tujuan penelitian kualitatif pada umumnya diarahkan untuk penyediaan pemahaman yang mendalam terkait dunia sosial. Penelitian kualitatif berupaya untuk memahami keadaan sosial, keadaan material, pengalaman, dan perspektif. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dalam upaya peneliti memperoleh informasi terkait dengan isu yang diangkat sesuai realitasnya. Selain itu, penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat menjadi cara terbaik untuk memperoleh data yang kaya. Diharapkan akar penyebab serta informasi mendalam tentang masalah tersebut akan terungkap dengan lebih jelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1997, tepat ketika Negara India merayakan 50 tahun kemerdekaannya, Kochoeril Raman Narayanan menjadi presiden pertama yang terpilih dari kasta Dalit. Narayanan dilantik sebagai Presiden India kesepuluh yang merupakan perwakilan pertama dari kasta Dalit yang memegang jabatan prestisius tersebut. Awal mula karir politik Narayanan adalah karena permintaan dari Indira Gandhi yang merupakan sosok sentral dalam Kongres Nasional India kala itu. Narayanan kemudian memenangkan tiga pemilihan umum berturut-turut di Lok Sabha dan menjabat sebagai Menteri Negara di Union

Cabinet, di bawah Perdana Menteri Rajiv Gandhi. Kiprah politiknya kian gemilang, Narayanan kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden pada tahun 1992. Selanjutnya, Narayanan akhirnya sukses menduduki kursi Presiden India pada tahun 1997.

Hal tersebut sebagian disebabkan oleh liberalisasi ekonomi di India yang mengurangi kontrol negara terhadap ekonomi dan sebagian karena kebangkitan partai-partai berbasis kasta yang menjadikan politik pemberdayaan kasta yang lebih rendah sebagai bagian utama dari agenda politik di sana. Partai-partai ini memandang program pembangunan dan supremasi hukum sebagai institusi yang digunakan oleh kasta atas untuk mengontrol dan menundukkan kasta yang lebih rendah. Alhasil, parpol-parpol baru ini berupaya melemahkan lembaga-lembaga tersebut dan pada gilirannya melemahkan dominasi kasta atas dalam percaturan politik di India. Masa jabatan Narayanan sebagai Presiden India berakhir pada 25 Juli 2002.

Selang 15 tahun kemudian, India kembali memilih presiden baru dari sistem kasta terendah Hindu, Dalit, yaitu Ram Nath Kovind. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur dari negara bagian sebelah utara India, Bihar. Pencalonan kembali aktor politik yang berasal dari kasta terpinggirkan dengan jabatan tinggi, tentunya menyebabkan publik terkejut. Bahkan, dilaporkan beberapa media lokal memberitakan hal ini dengan *kutipan 'only PM Modi and God knows'* (BBC World: 2017). Dalam pemilihan itu, Ram Nath Kovind didukung koalisi sejumlah partai di India bernama *National Democratic Alliance (NDA)*.

Kemenangan Kovind sebenarnya sudah terlihat jelas dari koalisi partai yang mendukungnya.

Dalam putaran ini, NDA adalah koalisi dengan jumlah partai pendukung terbanyak, yakni 16 partai. Kehadiran Kovind sebagai kandidat presiden juga dipandang luas sebagai strategi Perdana Menteri India, Narendra Modi guna memuluskan jalan pemerintahannya. Kovind yang merupakan keturunan kasta Dalit, salah satu kasta dengan jumlah penduduk terbesar di India, dianggap mampu memenangkan hati para pemilih pemilu Perdana Menteri pada tahun 2019 untuk memenangkan Modi kembali. Sensus menunjukkan saat pencalonan Kovind dilakukan, kelompok Dalit total berjumlah sekitar 200 juta, di negara berpenduduk 1,3 miliar (Krishnan, 2017).

Hal ini membuktikan bahwa klientelisme terhadap kasta Dalit memang benar-benar terjadi di India. Perpolitikan di India sangat bergantung pada hubungan patron-klien di sepanjang garis kasta selama periode kepemimpinan Kovind. Kasta yang diemban individu berfungsi sebagai faktor utama keputusan yang kuat dari pola pemungutan suara mereka. Di India, partai politik yang berbeda mewakili kepentingan kelompok kasta yang berbeda pula. Kelompok pemilih yang loyal biasanya mendukung kandidat atau partai tertentu selama pemilihan dengan harapan mendapatkan keuntungan setelah kandidat mereka menjabat.

Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Eisenstadt dan Roniger (1980) yang mengemukakan bahwa klientelisme

merupakan transaksi antara aktor politik dan masyarakat untuk meraih keuntungan yang berlangsung dua arah dengan didasarkan rasa wajib. Di dalamnya juga terdapat ketidakseimbangan kekuasaan diantara mereka yang ikut serta. Banyak partai politik di India secara terbuka terlibat dalam politik bank suara berbasis kasta atau juga disebut "*votebank*". Partai di India menggunakan bank suara untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sementara itu, bagi partai yang bersaing membangun bank suara untuk menantang dominasi politik lainnya.

Jumlah Dalit yang besar dan diskriminasi yang sudah menahun mereka alami tentu saja bisa jadi sumber kekuatan politik yang besar, bagi mereka yang sadar dan memanfaatkannya. NDA merupakan partai yang melihat peluang itu, sehingga akhirnya mempercayai Kovind untuk duduk di tahta kepresidenan. Kemenangan yang diraih Ram Nath Kovind disebabkan oleh perilaku pemilih dengan pendekatan psikologis yang digunakan oleh Modi dan NDA melalui visi kepemimpinan akan memanifestasikan "India Baru". Orientasi pencalonannya dilakukan karena Kovind merupakan salah satu sosok aktif dalam menangani konflik-konflik kasta minoritas, khususnya Dalit. Loyalitas antara Dalit dengan Kovind timbul karena keyakinan isu diskriminasi bertahun-tahun ini dapat diatasi. Dalam hal ini, klientelisme merujuk pada ikatan-ikatan personal antara sang patron Kovind dan kliennya kelompok Dalit.

Kasta Dalit yang dalam hal ini adalah klien tentu mengharapkan adanya potensi manfaat bagi kelompoknya dengan terpilihnya Presiden Ram Nath Kovind sebagai patronnya. Akan

tetapi, bukti menunjukkan bahwa pengaruh kasta di India masih terus ada. Alih-alih menjadi lembaga yang sudah lama berdiri dan tidak berubah, politik tunduk pada pengaruh kasta. Perubahan kepemimpinan politik sepanjang sejarah India juga tidak menghasilkan perubahan berarti terhadap sistem kasta. Masa lalu India telah membentuk kasta menjadi sebuah sistem yang memiliki pengaruh penting pada mobilisasi politik. Kenyataannya, keuntungan terbanyak tetap didapatkan oleh kasta tinggi, sementara diskriminasi terhadap kasta Dalit masih terus terjadi.

Tidak semua elemen masyarakat menyambut baik terpilihnya Kovind sebagai Presiden India. Selama pemerintahan Kovind, jabatan presiden yang dipukulnya, dinilai hanya bersifat seremonial karena pemimpin eksekutif dipegang oleh perdana menteri. Terpilihnya presiden dari kasta Dalit hanya dianggap sebagai langkah simbolis politik semata, karena ideologi partai tidak memihak masyarakat Dalit. Contoh nyatanya dapat dilihat melalui keputusan Mahkamah Agung yang melemahkan perlindungan bagi masyarakat dengan kasta yang lebih rendah pada tahun 2018 lalu (Mega, 2018). Keputusan tersebut tentu menyulut kemarahan serta kekecewaan kasta Dalit terhadap pemerintah. Akibatnya mulai banyaknya generasi muda Dalit yang peduli akan isu diskriminasi kasta demi meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Terpinggirkannya kelompok Dalit melahirkan kesadaran tentang sistem kasta yang secara historis terus dipuja. Kesadaran ini selanjutnya menghasilkan gerakan *Dalit*

Lives Matter yang terinspirasi juga dari gerakan *The Black Lives Matter*. Kasta Dalit terus menyuarakan eksploitasi, penindasan dan kekerasan yang mereka alami. Aktivitas Kampanye Nasional Hak Asasi Manusia Dalit (NCDHR) dan gerakan Dalit yang umumnya di PBB dan WSF merupakan sebuah strategi mengglobal terkait pengaruh yang berkembang pada semua struktur lokal, nasional, dan internasional dimana hasilnya diharapkan dapat mempengaruhi kastaisme dan kesejahteraan yang mereka perebutkan. Pada inti dari kontestasi ini adalah 'mobilisasi rasa malu' yang diarahkan pada kesadaran globalisasi kasta dalam upaya membawa perubahan domestik di India, agar Pemerintah India hidup hingga taraf norma nasional serta internasional hak asasi manusia dan untuk lebih menekankan keadilan sosial. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak bisa diterima oleh golongan konservatif, sehingga kekerasan juga dilaporkan semakin meningkat terutama di tahun 2020 tercermin dalam data dari Biro Catatan Kejahatan Nasional (NCRB).

Orientasi *subaltern theory* oleh Spivak dapat dilihat melalui dua hal pokok. Pertama, mengenai kiprah kelompok dominan untuk menciptakan pandangan *stereotype* (stigma). Stigma-stigma tersebut ternyata efektif sebagai pembeda yang selanjutnya dikembangkan menjadi instrumen peminggiran terhadap ruang gerak *subaltern*, seperti tampak dalam Gerakan *Dalit Lives Matters*. Kedua, orientasi teoritis Spivak digunakan juga untuk memahami tentang bentuk upaya masyarakat Dalit, baik dalam menghadapi resistensi dari kelompok dominan yaitu masyarakat dari kasta terdaftar, sehingga

tetap bisa melakukan upaya emansipasi. Strategi yang dikembangkan untuk menyatakan bahwa dirinya juga “ada” sebagaimana halnya yang lainnya (*self consolidating otherness*). Pernyataan semacam itu merupakan sebuah bentuk refleksi untuk menuntut adanya pengakuan kesetaraan hidup sebagaimana yang telah menjadi konvensi hak-hak asasi manusia (HAM) secara internasional.

Rencana penindakan golongan kecil tingkatan Dalit di India mempunyai berbagai perlawanan, tersudutkan dari sisi kesepadanan antar regulasi ataupun kendala dari strata sosial. Strategi penguatan untuk golongan kecil telah tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik India merupakan langkah maju dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan hak-hak sipil bagi mereka yang jumlahnya sedikit dibandingkan masyarakat kasta dominan. Sebagai negara yang dibangun di atas keberagaman, tentunya tidak mudah bagi India untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik yang memadai, tetapi juga dalam hal penghormatan terhadap keberagaman, menjamin hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan masyarakat. kesejahteraan kelompok yang seimbang. Di antara tantangan yang dihadirkan oleh sistem kasta adalah kebutuhan untuk sering menemukan keselarasan dengan nasionalisme sebagai konsep yang mendukung integrasi. Semua orang India harus memiliki hak yang sama dalam bentuk dan bentuk *non discrimination*

policy maupun *affirmative policy* tanpa terkecuali.

5. KESIMPULAN

Jabatan presiden berasal dari kasta Dalit yang berhasil diraih oleh Ram Nath Kovind (2017-2022) seakan hanya sebuah “*tittle*” bagi dirinya. Tidak ada jaminan sepenuhnya untuk menghilangkan stigma kasta dari India. Gerakan untuk memperjuangkan kasta Dalit, meskipun kuat, namun masih ditandai oleh permasalahan kemiskinan, gender, wilayah, bahasa, agama, dan kelas sosial. Hubungan patron-klien yang terjadi hanya untuk mengumpulkan *votebank* ketika pemilu India berlangsung. Berbagai perdebatan terkait keberadaan kasta Dalit terus diperbincangkan dari masa lalu hingga masa kini, namun tetap saja tidak ada perubahan berarti bagi mereka. Hal ini dikarenakan konstitusi India seakan menggariskan peran seorang presiden yang sebagian besar hanya seremonial belaka, sementara perdana menteri dan kabinetnya memegang peran eksekutif. Gerakan memperjuangkan kesejahteraan kasta Dalit justru dilakukan mandiri oleh masyarakat tanpa adanya dukungan yang berarti dari pemerintah. Klientelisme politik terhadap kasta Dalit sudah sangat jelas hanya menguntungkan sang patron tanpa adanya *win-win solution*.

6. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Arild Engelsen Ruud. (2011). Dalit Politics in India—Some Recent Studies. *Forum for Development Studies, Volume 31, 2004 - Issue 1*
- Anne Waldrop. (2011). Dalit Politics in India and New Meaning of Caste. *Forum for Development Studies, Volume 31, 2004 - Issue 2*.

- Eisenstadt, S. N., & Roniger, L. (1980). Patron—client relations as a model of structuring social exchange. *Comparative studies in Society and History*, 22(01), 42-77.
- Subin Paul & David O. Dowling. (2018). Digital Archiving as Social Protest: Dalit Camera and the mobilization of India's "Untouchables". *Digital Journalism*, Volume 6, 2018 - Issue 9.
- Murali Krishnan. (2017). *India's Dalit president - symbolism and reality*. Diakses melalui <https://www.dw.com/en/ram-nath-kovind-as-indias-dalit-president-symbolism-and-reality/a-39767055>

Buku

- Subrata K. Mitra. (2011). *2nd Edition Politics in India - Structure, Process and Policy*. New Delhi: Routledge.
- V.T. Rajshekara. (2003). *Dalit - The Black Untouchables of India - 2nd print*. India: Clarity Press, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitatives, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edition ed.). SAGE.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (Eds.). (2013). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. New York: Sage.

Internet

- Abhinav Prakash Singh. (2019). *The twin crisis of Dalit politics and Dalit discourse*. Diakses melalui <https://www.hindustantimes.com/analysis/the-twin-crisis-of-dalit-politicsand-dalit-discourse/story-zQBDM8I7QovbHCiiN5LfSP.html>
- BBC World. (2017). *Ram Nath Kovind, Anggota Kasta Terendah India yang Jadi Presiden*. Diakses melalui <https://news.detik.com/bbc-world/d-3568551/ram-nath-kovind-anggota-kasta-terendah-india-yang-jadi-presiden>.
- Mega. (2018). *Ribuan orang Kasta Dalit berunjuk rasa menentang keputusan diskriminatif MA India*. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/dunia/ribuan-orang-kasta-dalitberunjuk-rasa-menentang-keputusan-diskriminatif-ma-india.html>